

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya dipandang sebagai proses multidimensional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pembangunan sebagai proses transformasi diharapkan mampu membawa berbagai perubahan secara adil agar pembangunan dapat diarahkan kepada efisiensi (*efficiency*), pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan (Rustiadi dan Pranoto, 2011). Menurut Sugiharto (2006), pembangunan hendaknya dapat mencerminkan konsep pemerataan dalam setiap aspek baik aspek pemerataan antar sektor maupun aspek pemerataan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, akan tetapi, proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum mencerminkan konsep pemerataan sehingga telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak seimbang. Hal tersebut dapat dilihat dari interaksi antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan yang memiliki hubungan saling memperlemah, dimana berkembangnya kota sebagai pusat kegiatan menyebabkan terserapnya sumberdaya yang dimiliki kawasan pedesaan oleh kawasan perkotaan (Brahmanto, 2013). Akibatnya, hubungan yang saling memperlemah ini menimbulkan kawasan perkotaan cenderung berkembang dibandingkan kawasan pedesaan sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, dalam pemerataan pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pemerataan pedesaan.

Upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensialnya. Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah untuk pemerataan kesejahteraan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan fasilitas pelayanan yang merata baik daerah pusat maupun daerah belakangnya (*hinterland*). Fasilitas pelayanan atau yang disebut dengan fasilitas sosial ekonomi merupakan faktor dalam pengembangan wilayah. Hal

tersebut dikarenakan fasilitas pelayanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk (Nirwani, 2014).

Sama seperti Kabupaten Blitar, dalam mengarahkan pengembangan perdesaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 sistem perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan dapat didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang dikawasan dalam pengembangan wilayah. Selain itu, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tergantung pada keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut (Umami, 2014).

Salah satu sektor perekonomian yang menjadi acuan di sebagian besar wilayah perdesaan adalah sektor pertanian. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah perdesaan hendaknya difokuskan pada pembangunan fasilitas dan sektor pertaniannya. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan lokal terbesar yang menjadi sektor penggerak ekonomi bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Blitar yang lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya (BPS Kabupaten Blitar, 2015). Besarnya potensi sektor pertanian di Kabupaten Blitar akan menjadi peluang untuk menciptakan daya saing dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerahnya.

Salah satu bentuk pengembangan wilayah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan juga dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi dalam upaya mengembangkan kawasan perdesaan. Sama halnya dengan Kabupaten Blitar, dalam rangka mengembangkan wilayah perdesaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mencanangkan pengembangan Kawasan Strategis Wilayah yakni Kawasan Agropolitan dengan Kecamatan Kanigoro sebagai sentra Kawasan Agropolitan. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan mendefinisikan agropolitan sebagai kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan

hirarki keruangan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Program pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro didukung dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 serta *master plan* Kawasan Agropolitan. Berdasarkan SK Penetapan Lokasi No.297 tanggal 30 Desember 2005, pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro terdapat 6 Desa dan 1 Kelurahan. Namun, pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Blitar No.188/319/409.012/KPTS dilakukan perubahan penetapan lokasi menjadi 10 Desa dan 2 Kelurahan yakni Desa Minggirsari, Desa Gogodeso, Desa Karangsono, Desa Tlogo, Desa gaprang, Desa Jatinom, Desa Kuningan, Desa Papungan Desa Banggle, Desa Sawentar, Kelurahan Satreyan dan Kelurahan Kanigoro. Kebijakan dan strategi penetapan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro juga tertulis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2008-2028.

Penetapan Kecamatan Kanigoro sebagai Kawasan Agropolitan didasarkan pada pokok-pokok persyaratan Kawasan Agropolitan. Salah satu persyaratan Kawasan Agropolitan tersebut adalah adanya potensi lokasi sebagai pusat pertumbuhan. Lokasi pusat pertumbuhan adalah lokasi yang memiliki kelengkapan pelayanan fasilitas seperti ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, umum, pemerintahan dan kemudahan lainnya yang akan memberikan keuntungan bagi daerah belakangnya (*hinterland*). Daerah belakang (*hinterland*) adalah daerah yang memiliki masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan aksesibilitas ke pusat pertumbuhan (BAPPENAS, 2004). Berdasarkan Laporan Perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar Tahun 2005 telah diketahui bahwa Kecamatan Kanigoro berpotensi sebagai pusat kegiatan dan penggerak ekonomi. Selain itu, Kecamatan Kanigoro juga secara spasial memiliki posisi ditengah-tengah Kabupaten Blitar yang dengan mudah dapat mengakses pelayanan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan fasilitas di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro masih belum dilakukan secara optimal dan merata. Hal tersebut ditandai dengan masih belum meratanya ketersediaan sarana

dan prasarana seperti sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan pemerintahan serta kurangnya aksesibilitas di masing-masing desa. Berdasarkan kendala-kendala tersebut diperlukan pengkajian untuk menentukan pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (*hinterland*) dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro.

Saat ini penelitian-penelitian tentang pengembangan kawasan agropolitan telah banyak dilakukan. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji eksistensi fasilitas pelayanan di kawasan agropolitan seperti ketersediaan sarana dan prasarana sosial (seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sarana rekreasi), sarana ekonomi (seperti pasar, kios pasar, warung makan, toko-toko, lembaga keuangan dan industri pertanian), sarana umum (seperti telekomunikasi, jaringan listrik dan air bersih), pemerintahan (seperti kantor kepala desa, kesos, trantib dan linmas) dan aksesibilitas antar kawasan (seperti transportasi dan ketersediaan jalan) serta daerah non basis pengembangan komoditas pertanian. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana tersebut akan menentukan lokasi pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (*hinterland*). Sementara pada penelitian sebelumnya, menganalisis lokasi pusat pertumbuhan dan menganalisis interaksi pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (*hinterland*) yang mempengaruhi pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Berdasarkan tujuan tersebut, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat menjadi referensi serta bahan pertimbangan dalam penyusunan arahan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro kedepannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan antar kawasan merupakan masalah pokok dalam mencapai upaya pengembangan wilayah. Ketimpangan terjadi akibat pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan melalui investasi besar pada sektor industri, sehingga daerah perkotaan menjadi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sektor industri hanya difokuskan atau dikembangkan sebagian besar di wilayah perkotaan. Sedangkan daerah perdesaan sebagai wilayah sentra produksi pertanian yang mengalami pembangunan dari wilayah perkotaan. Padahal, wilayah perdesaan memiliki peranan penting terhadap penyediaan sumber daya pertanian sebagai bahan baku (Jocom dkk, 2009). Konsekuensi lain ialah semakin meningkatnya mobilitas masyarakat ke daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana di perdesaan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja produktif di perdesaan yang bekerja khususnya pertanian beralih ke perkotaan untuk bekerja di sektor industri. Hal tersebut tentunya mempengaruhi pembangunan sektor pertanian di perdesaan. Ketidakseimbangan aliran sumber daya dari perdesaan ke perkotaan memicu permasalahan di perdesaan (Ginting, 2004).

Konsep agropolitan dipandang sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan perdesaan. Menurut Manik dkk (2013) konsep agropolitan merupakan sebuah pendekatan pengembangan kawasan pertanian pertanian yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya, baik yang berkaitan dengan sarana produksi, jasa distribusi serta pelayanan sosial ekonomi, sehingga konsep agropolitan sangat sesuai untuk diterapkan dalam pengembangan wilayah perdesaan.

Kabupaten Blitar adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerapkan konsep agropolitan dalam pengembangan wilayahnya. Sejak ditetapkannya sebagai daerah pengembangan agropolitan pada tahun 2005, Kabupaten Blitar mulai menyusun program-program dan menetapkan Kecamatan Kanigoro sebagai Kawasan Agropolitan. Pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Agropolitan telah banyak dilakukan untuk menunjang pengembangan wilayahnya. Akan tetapi, dalam

pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala. Kendala yang ditemui antara lain ketersediaan sarana dan prasana sosial (seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sarana rekreasi), sarana ekonomi (seperti pasar, kios pasar, warung makan, toko-toko, lembaga keuangan dan industri pertanian), sarana umum (seperti telekomunikasi jaringan listrik dan air bersih), sarana pemerintahan (seperti kantor kepala desa, kesos, trantib dan linmas), terbatasnya aksesibilitas antar kawasan (seperti transportasi dan ketersediaan jalan) masih kurang mendukung dan masih belum memenuhi kebutuhan penduduknya disebagian wilayah di Kecamatan Kanigoro. Hal tersebut mengakibatkan pergerakan penduduk berorientasi menuju ke wilayah yang memiliki ketersediaan fasilitas yang jauh lebih lengkap. Kendala lainnya antara lain masih belum adanya pusat pertumbuhan yang dapat menunjang pengembangan Kawasan tersebut. Adanya pusat pertumbuhan ini nantinya akan dapat mendorong pembangunan perdesaan di wilayah sekitarnya (*hinterland*).

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar?
2. Lokasi mana saja yang menjadi daerah belakang (*hinterland*) di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan untuk:

1. Menganalisis lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis lokasi yang menjadi daerah belakang (*hinterland*) di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan informasi, kontribusi dan bahan literatur atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang mengkaji mengenai Kawasan Agropolitan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat sebagai referensi dan bahan pertimbangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dalam penyusunan kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Blitar.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat sebagai tambahan informasi mengenai lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah belakang (*hinterland*) yang ada di Kawasan Agropolitan Kanigoro.

